



# Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK>



## Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Poppy Indrihastuti<sup>1</sup>, Hendrik Suhendri<sup>1</sup>, Maria Imelda Wini Paila<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Correspondence: E-mail: [pailamaria2001@gmail.com](mailto:pailamaria2001@gmail.com)

### ABSTRACT

The lowest level of government, the village, is largely dependent on well-managed and disciplined financial management based on participatory ideals, accountability, and linkage. The city's fiscal year runs from January 1 to December 31. According to Regional Regulation No. To improve the quality of financial reporting, make the intended financial reports more credible, and make financial management by the village government more transparent and accountable, Minister of Home Affairs Regulation (PERMENDAGRI) Number 37 of 2007 was first enacted and last implemented on December 31, 2014. financial bookkeeping to the Kalisongo Village Office in Dau District, Malang Regency. This study uses a descriptive-qualitative methodology. This study used primary and secondary data. Through observation, meetings, and documentation, research data were obtained. The results showed that financial stimulant reports, which included the Village Income and Expenditure Budget (APB Desa), General Cash Books, Tax Books, and Budget Realisation Reports (LRA) for the Kalisongo Village Office, were very successful.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 27 June 2023

First Revised 1 July 2023

Accepted 30 July 2023

First Available online 31 July 2023

Publication Date 31 July 2023

#### Keyword:

Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa), Budget Realization Report (LRA), Village Financial Report.

## 1. INTRODUCTION

Desa, meskipun merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia, memiliki fungsi yang sangat penting bagi Negara dan memiliki tempat yang signifikan dalam struktur politik bangsa. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mengakui atau mempertahankan hak tradisional yang biasa disebut dengan hak asal usul. Suhendri, dkk. (2023) bahwa desa memiliki batas geografis yang jelas dan merupakan badan hukum tersendiri dalam masyarakat. Operasi pemerintah daerah, kepentingan masyarakat berdasarkan upaya akar rumput, dan hak-hak ini juga dikendalikan dan diawasi olehnya. Desa akan digunakan secara bergantian di sepanjang pembicaraan ini untuk merujuk pada desa tradisional dan jenis pemukiman lainnya.

Menurut Adira Fairus (2020), desa adalah kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu wilayah yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungannya. Menurut Kamus Besar Kata Bahasa Indonesia, kota adalah kumpulan tempat tinggal di luar kota yang membentuk satu kesatuan atau bentukan geologis yang dimiliki oleh banyak keluarga dan memiliki sistem administrasi sendiri (dipimpin oleh seorang kepala kota).

Pengelolaan keuangan desa yang disiplin dan terjadwal secara teratur didasarkan pada konsep inti transparansi, tanggung jawab, dan keterlibatan. Untuk memperkuat standar pelaporan keuangan dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimaksud, pengelolaan keuangan pemerintah desa harus diperoleh dan dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disengaja juga digunakan untuk meningkatkan kredibilitas mereka.

Keuangan kota mencakup semua pendapatan dan aset lain yang diperlukan untuk melaksanakan semua hak dan tanggung jawab yang dimiliki desa yang dapat dibayar dengan uang. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua hal berikut selain membuat laporan keuangan desa: pelaporan, tanggung jawab, pembinaan, dan pengawasan adalah bagian dari proses.

Peraturan No. 6, Pasal 6. Pada akhir tahun 2015, desa akan mendapatkan uang setara dengan 10% dari APBN, menurut laporan desa tahun 2014. Jumlah nominal yang disumbangkan ke setiap kota akan bervariasi tergantung lokasi, jumlah penduduk, dan kematian. kecepatan. Pembayaran ini tidak akan melalui perantara dan akan langsung diberikan kepada masyarakat. Ikrar utama yang mendukung pemberian bantuan kepada semua kelompok sosial ekonomi adalah Undang-Undang Desa.

Dalam rangka mengatur daerah pedesaan dan mendukung perluasan pemerintahan, pemerintahan desa merupakan pos terdepan dari pemerintah pusat. Atas dasar pemikiran inilah aturan atau undang-undang dibuat untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan seefisien mungkin.

Amaliya Nadirsyah (2017) Justifikasi penerapan Permendagri No. Pasal 113 Tahun 2014 yang mencita-citakan pemenuhan tiga komponen good governance akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan salah satu langkah untuk mencapainya. Pemerintah desa harus mematuhi rekomendasi Permendagri No. dalam laporannya, meskipun belum dapat melakukannya karena kurangnya sumber daya manusia yang seimbang dan memadai. 113 Tahun 2014. Dua hambatan yang lebih khas adalah tidak adanya infrastruktur dan fasilitas penanganan keuangan desa dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam administrasi anggaran.

Pemerintah setempat telah memberikan uang kepada Dusun Kalisongo yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Wakil pemerintah bertugas menyalurkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Desa Kalisongo selalu berupaya memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang

tersedia. Bahkan dengan bantuan perencanaan, pemantauan, dan pelibatan masyarakat, sistem tata kelola yang efektif hanya dapat beroperasi dengan keuangan yang memadai. Bersama kelompok yang bertugas menyusun APBDes dan LRA tahunan, kepala desa harus merencanakan dan menganggarkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana uang desa ditangani dan digunakan jika pembangunan daerah yang unggul dan pemberdayaan masyarakat ingin dicapai.

Dalam bentuk rencana program yang dibiayai oleh dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes digunakan untuk memberikan informasi tentang segala kegiatan desa dan bagaimana pelaksanaannya, berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban bagi pemegang pengelolaan daerah. APBDes memperhitungkan semua pengeluaran, pendaan, dan pendapatan desa.

Sebuah laporan yang disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) membandingkan jumlah anggaran untuk waktu tertentu dengan data yang berbeda tentang realisasi anggaran, keuangan, pengeluaran, dan faktor lainnya. Laporan anggaran, secara umum, mencakup serangkaian data terkait anggaran keuangan

## 2. METHODS

Implementasi Kantor Desa Kalisongo dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif untuk menganalisis penyajian laporan keuangan. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada menemukan dan menganalisis kata-kata (lisan atau tulisan) selain materi tekstual atau memantau bahasa tubuh orang yang bersangkutan (Kamayanti, et al., 2022). Strategi ini umumnya digunakan dalam penelitian dengan maksud dan tujuan penelitian eksploratif (Kamayanti et al., 2022). Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Kalisongo yang berada di Jl. Dieng. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik yang dipermasalahkan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk memeriksa data yang mereka peroleh. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah yang terjadi atau sedang dihadapi, pendekatan deskriptif adalah salah satu yang menggunakan teori-teori terkait untuk menjelaskan bagaimana mengkarakterisasi data penelitian sehubungan dengan topik yang sedang dibahas.

Analisis data adalah teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan data secara metodelis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menurut Sugiyono (2018: 482). Untuk memahami data, seseorang harus mengkategorikannya, mendeskripsikannya dalam unit-unit, mensintesisnya menjadi pola, memutuskan pola mana yang penting dan akan diajarkan, dan membuat kesimpulan.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Salah satu kota di Daerah Dau Rezim Malang Jawa Timur adalah Kota Kalisongo. Terletak di perbukitan utara Kota Malang, memiliki banyak perumahan kelas menengah atas, dapat diakses dari sini ke pusat kota, dan terhubung langsung ke Kecamatan Sukun, yang terdiri dari 10 desa, termasuk Desa Kalisongo seluas 4,80 Km<sup>2</sup>. Dusun Sumberjo, Dusun Kunci, Dusun Loandeng, dan Dusun Kuso adalah empat dusun yang membentuk Desa Kalisongo. Di Desa Kalisongo yang berpenduduk 8.786 jiwa, 4.412 laki-laki dan 4.374 perempuan, serta 2.123 Kartu Keluarga (KK), terdapat 7 RW dan 43 RT.

Kehidupan masyarakat yang tinggal di Desa Kalisongo bergantung pada karyawan swasta, pemilik usaha, buruh tani, petani, tukang batu, pedagang, peternak, mekanik, dokter, pegawai negeri, nelayan, dan pengrajin. Desa Karang Widoro di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Desa Kucur di Kecamatan Dau, Desa Wagir di selatan, Desa Pandan Landung di selatan, Desa Pisang Candi di Sukun, Kodya, Malang, dan Karang Bes di timur, serta Desa Pandan Landung di sebelah selatan membentuk batas Desa Kalisongo.

#### Analisis Penyajian Data Laporan Keuangan Kantor Desa Kalisongo

Berdasarkan kesimpulan kajian, diindikasikan bahwa infrastruktur dan media komputer yang mengukung program Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) berperan sebagai wahana penyampaian laporan keuangan di Kantor Desa Kalisongo. Sistem penyajian laporan keuangan kombinasi media komputer dan program Siskeudes dapat membuat laporan keuangan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manual atau lainnya. Selain itu, mesin-mesin bekas di Kantor Desa Kalisongo, termasuk komputer dan komponen infrastruktur lainnya, dalam kondisi sangat baik (dapat dioperasikan atau berfungsi) untuk mendukung operasional operasional desa.

Munawir (2017) menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan sumber yang sangat baik untuk memahami posisi keuangan perusahaan dan pencapaiannya. Dua contoh instrumen yang sering digunakan di perusahaan adalah komputer dan mesin tik.

Menurut laporan data dari Desa Kalisongo tentang penyajian laporan keuangan, banyak laporan keuangan yang telah diberikan dalam rangka menjalankan peran memberikan laporan keuangan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Persyaratan tata kelola desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dengan mengacu pada penatausahaan dana desa.

Agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh penduduk sesuai dengan yang diharapkan, kepala desa dan perangkat desa lainnya melakukan pencatatan keuangan dan berdoa agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan dan pengelolaan dana desa. . memperoleh kewajiban dan hak istimewa masyarakat.

Laporan keuangan desa merupakan data olahan yang dapat memberikan pemahaman atau penjelasan kepada kepala desa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pengambilan keputusan atau langkah selanjutnya, menurut penatausahaan laporan keuangan di Kantor Desa Kalisongo.

Kajian penelitian menunjukkan bahwa perangkat yang digunakan di Kantor Desa Kalisongo untuk menyampaikan laporan keuangan telah digunakan dengan baik oleh pegawai atau perangkat desa dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggambaran realitas sebagai pengetahuan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum mengubah input menjadi informasi, komputer memprosesnya. Jika diperlukan untuk verifikasi administrasi atau hukum, arsip selalu dapat dikeluarkan dari penyimpanan. Program laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Informasi dari laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo.

| No | Laporan Keuangan                               | Alokasi Dana         |
|----|--|----------------------|
| 1  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) | Rp. 907.359.504,52   |
| 2  | Buku Kas Umum                                  | Rp. 1.022.339.028,63 |

|   |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 3 | Buku Pajak                       | Rp. 74.857.918,00    |
| 4 | Buku Bank                        | Rp. 949.821.110,63   |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Rp. (947.481.110,63) |

Sumber : Data Sekunder Desa Kalisongo 2022.

Berdasarkan Data Laporan Keuangan Kantor Desa Kalisongo, membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan di Kantor Desa kalisongo sudah berjalan dengan efektif dan dalam laporan keuangan juga sudah memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

Hal ini dapat dilihat dari data penyajian laporan keuangan pada Rp. 907.359.504,52. Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.022.339.028,63. Buku Pajak sebesar Rp. 74.857.918,00. Buku Bank sebesar Rp. 949.821.110,63 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp. (947.481.110,63).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah nama rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah memasukkannya ke dalam peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah salah satu contoh pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Menurut Permendagri No., Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD 113 Tahun 2014) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

**Tabel 2.** APBDesa

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pemerintahan Desa Kalisongo

Tahun Anggaran 2022

| Uraian                                      | Anggaran                    |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Pendapatan Desa</b>                   | <b>Rp. 2.300.939.817,00</b> |
| a. Pendapatan Asli Desa                     | Rp. 49.500.000,00           |
| b. Dana Desa                                | Rp. 1.043.452.000,00        |
| c. Alokasi Dana                             | Rp. 680.490.000,00          |
| d. Bagi hasil pajak Daerah                  | Rp. 527.497.817,00          |
| e. Pendapatan Transfer                      | Rp. 2.251.439.817,00        |
| <b>2. Belanja Desa</b>                      | <b>Rp. 3.208.299.321,52</b> |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 1.296.347.478,82        |
| b. Bidang Pembangunan Desa                  | Rp. 1.506.120.912,70        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp. 94.421.500,00           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp. 186.314.930,00          |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana            | Rp. 125.094.500,00          |
| Surplus/Defisit                             | Rp. (907.359.504,52)        |
| <b>3. Pembiayaan</b>                        |                             |
| <b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>             | <b>Rp. 957.359.504,52</b>   |
| a. Silpa PAD                                | Rp. 32.542.235,00           |
| b. Silpa DDS                                | Rp. 205.413.320,00          |
| c. Silpa ADD                                | Rp. 32.628.456,00           |
| d. Silpa PBH                                | Rp. 686.775.492,70          |
| <b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>            | <b>Rp. 50.000.000,00</b>    |
| a. Penyetaan Modal BUMDes                   | Rp. 50.000.000,00           |
| Selisih Pembiayaan (A dan B)                | Rp. 907.359.504,52          |
| Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran    | 0,00                        |

2. Buku Kas Umum adalah catatan yang merangkum dokumentasi bisnis tentang arus kas masuk dan keluar. Buku kas umum diperlukan untuk perusahaan mana pun, terlepas dari ukurannya, untuk merekonsiliasi bagaimana transaksi sebelumnya dapat dipertanggung jawabkan dalam hal kejadian di masa depan.

**Tabel 3. Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum  
Pemerintahan Desa Kalisongo  
Tahun Anggaran 2022

| No            | Tanggal  | Uraian  | Penerimaan              | Pengeluaran             | Saldo                   |
|---------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |          |   | (Rp)                    | (Rp)                    | (Rp)                    |
| 1             | 01/01/22 | 0001-4/TBP/22.2002/2022<br>Silpa Dana Desa Tahun Sebelumnya (2021).   | 584.304.646,63          | 0,00                    | 584.304.646,63          |
| 2             | 04/04/22 | 0005-15/TBP/22.2002/2022<br>Pendapatan Transfer dan Alokasi Dana Desa.  | 666.905.020,00          | 0,00                    | 1.248.209.666,63        |
|               |          | 0001-15/SPP/22.2002/2022<br>BLT DD Bulan Januari-Maret (108 KK), Silpa Kepala Desa dan Perangkat Desa Januari-April, Tunjangan Perangkat dan Kedudukan BPD Januari-April, Serta Pembayaran Segala Keperluan atau pengeluaran Desa dan Belanja Bulan April.                      |                         | 289.578.990,00          | 958.630.676,63          |
| 3             | 31/05/22 | 0016-30/TBP/22.2002/2022<br>Potongan Pajak PPN Pusat dan Pajak PPh Pasal 22,23.   | 2.864.900,00            |                         | 961.498.576,63          |
|               |          | 0016-30/SPP/22.2002/2022<br>Silpa Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Mei, Tunjangan Kedudukan BPD   |                         | 60.301.310,00           | 900.997.006,63          |
| 10            | 02/12/22 | 00467-682/KWT/22.2002/2022<br>Potongan Pajak PPN Pusat dan Pajak PPh Pasal 21,22,23, Pendapatan Transfer, Pajak Restoran Rumah Makan dan Pendapatan Asli Desa.  | 613.536.965,00          |                         | 1.550.083.487,63        |
|               |          | 0166-239/SPP/22.2002/2022<br>Silpa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bulan Desember, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Kedudukan BPD Bulan Desember, BLT DD Bulan Oktober-Desember (108 KK) dan Pembayaran Segala Keperluan atau pengeluaran Desa dan Belanja Bulan November. |                         | 527.744.459,00          | 1.022.339.028,63        |
| <b>JUMLAH</b> |          |   | <b>3.177.844.748,63</b> | <b>2.155.505.720,00</b> | <b>1.022.339.028,63</b> |

3. Pajak adalah pembayaran pungutan yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah negara bagian. Agar pemerintah dapat membiayai pertumbuhan dan menghasilkan uang, seluruh rakyat Indonesia wajib membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2016), konsep pajak adalah pembayaran kepada negara yang wajib dilakukan oleh setiap orang dan yang masuk ke kas negara. Negara atau otoritas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang tersebut melakukan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Semua transaksi perpajakan, termasuk penyeteroran dan pembayaran pajak, dimasukkan ke dalam buku pembantu pajak untuk dicatat. Buku bantu pajak adalah buku yang berisi catatan transaksi yang melibatkan pajak. Tugas buku pembantu pajak adalah mencatat semua transaksi kena pajak dan melacak pengumpulan dan penyerahan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

**Tabel 4. Buku Kas Pembantu Pajak**

| BUKU KAS PEMBANTU PAJAK<br>PEMERINTAHAN DESA KALISONGO KECAMATAN DAU<br>TAHUN ANGGARAN 2022 |   |                 |                  |               |  |
|---|---|-----------------|------------------|---------------|--|
| Tanggal   | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp)    |  |
| 18/04/22  | 0004-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Kontribusi Biaya Ases Desa Kalisongo dan Potongan Pajak PPN Pasal 21   | 500.000,00      | 0,00             | 500.000,00    |  |
| 31/03/22  | 0004-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota dan Sewa Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23   | 3.117.000,00    | 0,00             | 3.117.000,00  |  |
| 18/04/22  | 0004-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Potongkapan TK Dikawatiratkan 1, Sewa, Honor Kegiatn dan Honor Kasmadmbh Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23  | 3.237.000,00    | 0,00             | 3.354.000,00  |  |
| 01/07/22  | 0010-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota, Honor Kasmadmbh, Sewa, Honor, Kasmadmbh, Kupon dan Biaya Material Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23   | 0.747.000,00    | 0,00             | 18.101.000,00 |  |
| 06/08/22  | 0004-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota, Konsumsi, Pajak Restoran/Wasah, Makan, Honor Kasmadmbh/Seragam, Pakaian 30 Stel dan Biaya Lain Kegiatn Pelaksanaan Kasmadmbh Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23  | 3.223.200,00    | 0,00             | 21.324.200,00 |  |
| 02/09/22  | 0004-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota, Bahan K-300 Ready Mix 21 m <sup>3</sup> , Sewa, Honor Kegiatn, Konsumsi dan Pajak Restoran/Wasah, Makan, Honor Potongan/Pem. angkan. Himpunan 18 Kasm  | 11.000.000,00   | 0,00             | 37.324.200,00 |  |
| Laporan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23                                       |   |                 |                  |               |  |
| 06/10/22  | 0029-KW/22.2002/2022<br>Dinas Cor Bermah RT 03 RW 03, Pembayaran Sewa, Nota, Kowmasi dan Kunjungan Site dan Konsultasi tim Perencanaan, Pembangunan Rest Area Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23  | 2.997.500,00    | 0,00             | 40.321.700,00 |  |
| 18/11/22  | 0039-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota, pupuk Kandang dan Urea Non Subsid, Round UP, Tandon Air 1000, Sewa Traktor, Konsumsi dan Pajak Restoran/Wasah, Makan, Jajir dan Brodir Seragam, Pipanisasi Air Bersih Dusun Lomdang Dengan Potongan Pajak PPN Pusat dan PPh Pasal 22, 23   | 11.941.053,00   | 0,00             | 52.262.753,00 |  |
| 02/12/22  | 0040-KW/22.2002/2022<br>Pembayaran Nota, Service Printer dan Pergantian Sparepart, Meja dan Kursi Poyandh unil, Konsumsi, Pajak Restoran/Wasah, Makan, Jajir Honor, Pemeliharaan Ubit Perchap dan Jaringan Listrik, Bantuan Bongkaran, Honor Petagas dan Tim, Pupuk Urea Non Subsid, Kandang,Za, Mutiara, Escher Budamber, Bihit Sayur, Lela dan Anggur, Pakaian, Seragam Putih 12 Stel, Pestisida Cair,Prasasti, Pengabdian LPJ dan Penjilidan 14 Eksmplar | 22.123.700,00   | 0,00             | 74.386.453,00 |  |
| Jumlah  |   | 74.386.453,00   | 0,00             | 74.386.453,00 |  |

4. Buku Bank digunakan untuk mencatat penyeteroran dan penarikan dari rekening kas lokal. Buku bank adalah pelengkap buku kas standar dalam hal penerimaan dan pembayaran yang melibatkan uang bank.

**Tabel 5. Buku Bank**

| Buku Bank<br>Pemerintahan Desa Kalisongo<br>Tahun Anggaran 2022 |                                  |   |                |                |                  |
|---|----------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tanggal   | Nomor Bukti                      | Uraian  | Penerimaan     | Pengeluaran    | Saldo            |
|   |                                  |   | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)             |
| 01/01/22  | 0001-<br>4/TBP/22.200<br>2/2022  | SILPA Dana Desa Tahun<br>Sebelumnya   | 584.304.646,63 |                | 584.304.646,63   |
| 04/04/22  | 0005-KW/22.200<br>2/2022         | Pendapatan Transfer   | 665.855.020,00 |                | 1.250.161.666,63 |
|   | 0001-<br>15/SPP/22.20<br>02/2022 | BLT DD Bulan Januari-<br>Maret (108 KK),<br>Pembayaran Segala<br>Keperluan Atau<br>Pengeluaran Desa Dan<br>belanja.               |                | 289.578.990,00 | 960.582.676,63   |
| 31/05/22  | 0016-<br>30/SPP/22.20<br>02/2022 | Silap Kepala Desa Dan<br>Perangkat Desa Bulan<br>Mei, Pembayaran Segala<br>Keperluan Atau<br>Pengeluaran Desa Dan<br>Belanja Desa |                | 60.501.210,00  | 897.879.166,63   |
| 10/06/22  | 0031-<br>40/SPP/22.20<br>02/2022 | Pemasangan ODGJ 7<br>Kali, Pembayaran Segala<br>Keperluan Atau<br>Pengeluaran Desa Dan  |                | 83.027.410,00  | 814.851.756,63   |

|                          |                                  |  |                  |                  |                  |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 05/11/22                 | 00171428/22<br>2002/2022         | Pendapatan Transfer  | 401.710.100,00   |                  | 1.331.800.000,00 |
|                          | 0125<br>145/SPP/22.2<br>002/2022 | Saluran Dana<br>Pembinaan Jalan<br>Koransi, Pemukiman,<br>Jarak, Pelatihan Lulusan,<br>PMT Balita Dan Lansia<br>Jurnal-Obhiter, Ineratif<br>Kantor KPM, OHSK,<br>Pelayanan Jamban,<br>Dinasiter, Papanisasi<br>Air Bersih, Seta<br>Pembayaran Segala<br>Kepentingan Atas<br>Pengeluaran Desa Dan<br>Melaya Desa. |                  | 445.744.201,00   | 886.182.309,00   |
| 02/12/22                 | 0016<br>22/TAP/22.200<br>02/2022 | Pendapatan Transfer  | 501.413.100,00   |                  | 1.477.565.300,00 |
|                          | 0160<br>230/SPP/22.2<br>002/2022 | Saluran Dana<br>Pembinaan Cipta<br>Balita Desa, Seta<br>Kepala Desa dan<br>Peningkat Desa Bulan<br>Dinasiter, BI, T DDP<br>Balita Cipta<br>Dinasiter CLOS KKS,<br>Serta Pembayaran Segala<br>Kepentingan Atas<br>Pengeluaran Desa Dan<br>Melaya Desa.  |                  | 537.744.899,00   | 940.811.110,00   |
| Total Transfer Realisasi |                                  |  | 3.102.964.839,00 | 2.103.168.729,00 |                  |
| Total Transfer Kumulatif |                                  |  | 3.102.964.839,00 | 2.103.168.729,00 | 940.811.110,00   |

5. Laporan realisasi anggaran membandingkan jumlah anggaran pada waktu tertentu dengan data lain tentang realisasi, pembiayaan, pengeluaran, dan faktor anggaran lainnya. Studi ini mencakup berbagai mata pelajaran terkait anggaran keuangan secara umum. Untuk memastikan apakah angka keuangan yang diberikan benar dengan yang ada di lapangan, maka digunakanlah pembuatan laporan ini.

**Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran**

**Laporan Realisasi APB Desa**  
**Pemerintahan Desa Kalisongo**  
**Tahun Anggaran 2022**

| Uraian   | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)          | Lebih/(Kurang) (Rp)   |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Pendapatan</b>  |                         |                         |                       |
| Pendapatan Asli Desa                                     | 82.000.000,00           | 70.000.000,00           | 12.000.000,00         |
| Pendapatan Transfer                                      | 2.115.015.817,00        | 2.445.362.184,00        | 330.316.367,00        |
| Dana Desa  | 982.228.000,00          | 982.228.000,00          | 0,00                  |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                           | 327.497.817,00          | 838.014.184,00          | 330.516.367,00        |
| Alokasi Dana Desa  | 625.290.000,00          | 625.290.000,00          | 0,00                  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                 | <b>2.197.015.817,00</b> | <b>2.518.532.184,00</b> | <b>318.516.367,00</b> |
| <b>Belanja</b>   |                         |                         |                       |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                 | 1.145.042.977,63        | 765.513.715,00          | 382.129.228,63        |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                      | 915.011.386,00          | 820.998.985,00          | 94.012.423,00         |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                          | 47.811.000,00           | 44.664.050,00           | 3.146.950,00          |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                           | 209.085.100,00          | 135.986.956,00          | 73.098.144,00         |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 408.920.000,00          | 390.342.000,00          | 76.578.000,00         |
| <b>Jumlah Belanja</b>                                    | <b>2.784.470.463,63</b> | <b>2.188.506.720,00</b> | <b>628.964.743,63</b> |
| Surplus/(Defisit)  | (587.454.646,63)        | 360.026.464,00          | (947.481.110,63)      |
| <b>Pembiayaan</b>  |                         |                         |                       |
| Penerimaan Pembiayaan                                    | 387.454.646,63          | 387.454.646,63          | 0,00                  |
| <b>Pembiayaan Netto</b>                                  | <b>387.454.646,63</b>   | <b>387.454.646,63</b>   | <b>0,00</b>           |
| Sisa/SALPA Tahun Berjalan                                | 0,00                    | 947.481.110,63          | (947.481.110,63)      |

**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo, Kecamatan Dau**

Laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri No., yang mengatur bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyampaikan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai lima pokok komponen laporan keuangan Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Desa Kalisongo tentang penyajian laporan keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan di Desa Kalisongo terbilang sangat baik. Hal ini disebabkan penyajian laporan keuangan tepat waktu, akuntabilitas setiap laporan keuangan, dan pencatatan laporan keuangan yang cermat. jelas menggabungkan laporan keuangan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang disalahgunakan. Cara penyajian laporan keuangan menunjukkan hal ini. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), sebuah sistem atau aplikasi tersendiri, telah digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat.

Menurut informasi yang dihimpun di lokasi penelitian, laporan pelaksanaan APBDesa, buku kas umum, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran di Desa Kalisongo semuanya disusun secara cermat setelah berkonsultasi dengan perangkat desa lainnya. Aparat desa secara metodis menyusun semua laporan keuangan, mulai dari penyelesaian dan pembagian uang desa, kemudian menyerahkannya kepada kepala desa dan sekretaris desa untuk diperiksa atau diperiksa kembali.

Hal ini sesuai dengan uraian Nurhayati (2019) tentang tata cara pembuatan laporan keuangan desa yang melibatkan pembuatan laporan keuangan desa secara cermat sesuai dengan anggaran, belanja, dan permukiman desa.

#### **4. CONCLUSION**

Hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Kantor Desa Kalisongo cukup baik dan cukup efektif karena sesuai dengan indikator akurat yang digunakan perangkat desa untuk menyusun data laporan keuangan dan penyampaian yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa data memenuhi persyaratan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan berguna berdasarkan indikator akurasi yang digunakan untuk membuat data. Hal ini dikarenakan tidak banyak kesalahan atau ketidakakuratan yang dilakukan dalam membuat dan mencatat laporan keuangan, dan karena sudah terdapat indikator yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan baik dan efektif karena data yang dikumpulkan dan dilaporkan berkaitan erat dengan data yang dibuat untuk anggaran. Tidak ada kesalahan atau kesalahpahaman sebagai konsekuensinya. sah dan diatur oleh pemerintah.

#### **5. AUTHORS' NOTE**

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Authors confirmed that the paper was free of plagiarism.

#### **6. REFERENCES**

Faizah, Alqi & Retnosari. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5. No. 1, Januari 2022.

- Handayani, Kalis. (2019). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Studi Pada Pemerintahan Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*, Vol.2. No.1, Februari 2019.
- Hartina, S. 2019. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Indahsari, Febriani Nur. (2016). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Pemerintahan Desa Sentul*, Vol.5. No.10, Oktober 2016.
- Khilmiyah, Isniatul dan Nur Handayani. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa*, STIESIA, Surabaya.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kema, Ihwan. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Mana. Vol.1. No. 3. 2013.
- Kusmandani, Novitha. (2022). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, FKIP.
- Khilmiyah, Isniatul. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang)*, Vol.5. No.12, Desember 2016.
- Manangkalangi, Kurniawan M. (2013). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Vol.1. No.3, September 2013. Hal. 22-31.
- Murni, Yetty. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Vol.6 edisi 12, Maret 2018. Hal. 139-154.
- Maulida, Rani. (2022). *Buku Kas, Memahami Pengertian, Jenis & cara membuat Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak*. Dipetik Desember 9, 2022, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/buku-kas>.
- Mukoffi, Ahmad & Wikardojo, Soko. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol.9. No.1, Maret 2022. Hal 73-88.
- Nirwana, Ahmad. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nuryati. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, Vol. 1. No. 2 (2019). Hal. 1-12.
- Saladin, Hendry. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan air Salek Kabupaten Banyuasin)*, Vol.18 No.3, Oktober 2021. Hal. 412- 425.
- Siagian, Raven Pardomuan & Pengemanan, Sifrid S. (2016). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go*, Vol.4. No.1, Maret 2016. Hal. 1450-1460.
- Sweetenia, Amanda Mutiara. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Sistem pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah*, Vol.17. No.1 (2019) : 45- 55.
- Saman, Silvester. (2020). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Lentang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

- Suhendri, H. (2019). Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Di ambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.
- Suhendri, H., Ventiyaningsih, A.D.I., Supriyono. (2023). Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis. Cetakan ke I: Januari 2023. Malang, Jatim : Literasi Nusantara.
- Sujarweni, Wiratna V. (2015). Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.
- Tangkuman, Steven. (2015). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara, Vol.3. No.1, Maret 2015. Hal. 592-600.
- Yatminiwati, Mimin. (2017). Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Vol.1. No.1, Januari 2017.